

NO	Nama Peraturan	Nomor	Tahun	Berita Daerah (BD)	Tanggal	Status	Keterangan	Catatan	Pemrakasa	SOFT
1	PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	1	2021	1	4-1-2021	MENCABUT	<a href="#">Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2020</a> tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan		BKAD	
						DICABUT	<a href="#">Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2022</a> Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	pemberian Tambahan Penghasilan dengan persetujuan menteri sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah		
2	TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2021	2	2021	2	8-1-2021	BERLAKU	-	-	DPMD	
3	TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021	3	2021	3	8-1-2021	MENCABUT	<a href="#">Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020</a> tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020	-	DPMD	
4	TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA	4	2021	4	8-1-2021	BERLAKU	-	-	DPMD	
5	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021	5	2021	5	8-1-2021	BERLAKU	-	-	DPMD	
6	PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGAT DESA DAN TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	6	2021	6	8-1-2021	BERLAKU	<a href="#">Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020</a> tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Operasional BPD serta Operasional Penyelenggara	-	DPMD	

							Pemerintahan Desa			
7	KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	7	2021	7	8-1-2021	MENCABUT	Pertauran Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	-	BAGIAN ORGANISASI	
8	PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH	8	2021	8	28-1-2021	BERLAKU	-	-	DPMD	
9	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA	9	2021	9	1-2-2021	MENGUBAH	Beberapa ketentuan dalam <a href="#">Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2020</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan pasal 8 diubah</li> <li>• Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA</li> <li>• Diantara Pasal 48 dan 49 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, Pasal 48E, Pasal 48F, dan Pasal 48G</li> <li>• Ketentuan Pasal 70 diubah</li> <li>• Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 70A</li> </ul>	melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	DPMD	
10	PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	10	2021	10	1-2-2021	MENCABUT	<a href="#">Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2020</a> ( Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 14) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali atau Bergelombang Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan	berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	DPMD	
11	PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH	11	2021	11	18-3-2021	BERLAKU	-	-	PUPR	
12	JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN DAN SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH	12	2021	12	18-3-2021	BERLAKU	-	-	DPAD	
13	PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2021	13	2021	13	12-4-2021	BERLAKU	-	-	DINKES	

14	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	14	2021	14	20-4-2021	MENGUBAH	Mengubah Perbup No.76 Th.2020 ttg Penjabaran APBD Tahun 2021	-Ketentuan Pasal 3 diubah Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 10 diubah -Ketentuan Pasal 12 diubah -Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7) Pasal 13 diubah -Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 21 diubah -Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 22 diubah -Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 24 diubah -Ketentuan Pasal 25 diubah -Ketentuan Pasal 26 diubah -Ketentuan Lampiran dalam Pasal 29 diubah	BKAD	
15	PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	15	2021	15	5-5-2021	MENCABUT	Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bintan	BKAD	
16	PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	16	2021	16	5-5-2021	BERLAKU	-	melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2021	BKAD	
17	PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA	17	2021	17	5-5-2021	BERLAKU			DPMD	
18	POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	18	2021	18	20-5-2021	BERLAKU	-	Melaksanakan Ketentuan Pasal 38 ayat (2) Permendagri No.79 Tahun 2018	BAGIAN PEREKONOMIAN	

19	PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIKBARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2021/2022	19	2021	19	31-5-2021	MENCABUT	Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan	Pasal 44 Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan	DINAS PENDIDIKAN	
20	PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN BINTAN	20	2021	20	31-5-2021				BKAD	
21	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH	21	2021	21	16-6-2021	MENCABUT	<a href="#">Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018</a> tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan	ketentuan Pasal 33, Pasal 33A dan Pasal 33B Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah	BAGIAN ORGANISASI	
22	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN	22	2021	22	16-6-2021	MENCABUT	Perbup Bintan No. 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan	ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	DINKES	
23	PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG	23	2021	23	16-6-2021	MENCABUT	Perbup No.39 Tahun 2020 ttg Petunjuk Pelaksana Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya	Melaksanakan Lampiran Permen PUPR No 5 Tahun 2021 ttg Petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus	PERKIM	

	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2021							infrastruktur PUPR TA.2021		
24	PEDOMAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA	24	2021	24	16-6-2021	MENCABUT	Perbup NO.21 Tahun 2019 tentang pedoman perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Desa		DPMD	
25	TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA	25	2021	25	16-6-2021	MENCABUT	Perbup No.22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	
26	PEDOMAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	26	2021	26	1-7-2021	BERLAKU	MENCABUT - Ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 9 Perbup No.25 Tahun 2019 ttg Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bintan - Ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23 Perbup No.6 Tahun 2020 ttg Petunjuk Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	-	BAGIAN PEMBANGUNAN	
27	PENANGANAN PEMULSARAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH KASUS KONFIRMASI COVID-19 DI KABUPATEN BINTAN	27	2021	27	1-7-2021	BERLAKU		-	BPBD	
28	IPEDOMAN KARANTINA ATAU ISOLASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI KABUPATEN BINTAN	28	2021	28	1-7-2021	BERLAKU			BPBD	
29	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022	29	2021	29	9-7-2021	BERLAKU			BAPELITBNAG	
30	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020	30	2021	30	6-9-2021				BKAD	
31	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022	31	2021	31	30-8-2021				BAPPELITBANG	

32	PETUNJUK PELAKSANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI LANJUT USIA MISKIN DI KABUPATEN BINTAN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2021	32	2021	32	30-8-2021	BERLAKU	-	-	DINAS SOSIAL	
33	PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	33	2021	33	10-9-2021	BERLAKU	Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah	BAPENDA	
34	PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	34	2021	34	10-9-2021	BERLAKU	Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian Gedung Pertemuan dan Tarif Retribusi Pemakaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a, huruf c dan huruf f Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah	BAPENDA	
35	PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	35	2021	35	10-9-2021	BERLAKU	Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga atas obyek Tempat Olahraga, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 huruf c Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah	BAPENDA	
36	TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	36	2021	36	10-9-2021	BERLAKU			BAPPENDA	
37	TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAG	37	2021	37	10-9-2021	BERLAKU			BAPPENDA	
38	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH	38	2021	38	10-9-2021	MENCABUT	<a href="#">Peraturan Bupati Bintan Nomor 63 Tahun 2019</a> Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	ditetapkannya <a href="#">Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021</a> tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI	
39	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN	39	2021	39	10-9-2021	MENGUBAH	PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 58 TAHUN 2018	Ketentuan Pasal 145-150, Paragraf 3 Pasal 151, Pasal 152, 153, Diantara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 153	BAGIAN ORGANISASI	

	FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH							A, Ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan (2), Pasal 155, Diantara Pasal 155 dan Pasal 156 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 155A, Pasal 156, Ketentuan Paragraf 5 Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Paragraf 6 Pasal 161 dihapus, Pasal 162 dihapus, Pasal 163 dihapus, Ketentuan BAB XVIII diubah, Ketentuan Pasal 296 diubah, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Diantara Pasal 299 dan Pasal 300 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 299A, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Ketentuan paragraf 5 Pasal 307, Diantara pasal 308 dan 309 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 308A, Diantara paragraf 5 dan paragraf 6 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 5A, Diantara Pasal 309 dan 310 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 309A, Pasal 309B, dan Pasal 309C, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Diantara Bab XXV dan BAB XXVI disisipkan 1 (satu) BAB yakni Bab XXVA dan 1 (satu) Pasal 379A.		
40	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH	40	2021	40	10-9-2021	MENGUBAH	BUPATI BINTAN NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2018: Ketentuan Pasal 56, Ketentuan Pasal 57 Pasal 58 Pasal 59 Pasal 60 Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 60A Ketentuan Pasal 61 Pasal 62 Pasal 63 Pasal 64 Ketentuan Paragraf 4 dan Pasal 65 Ketentuan Pasal 66 Pasal 67 Pasal 68 Diantara Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 4A Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 4 (Empat) Pasal yakni Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C	BAGIAN EKONOMI	

								dan Pasal 68D Ketentuan Pasal 69 Pasal 70 Pasal 71 Pasal 72 Pasal 73 Pasal 74 Pasal 75 Pasal 76 Pasal 77 Pasal 78 Ketentuan Paragraf 3 dan pasal 79 Pasal 80 Pasal 81 Ketentuan Paragraf 4 dan Pasal 82 Pasal 83 Pasal 84 Ketentuan Paragraf 5 dan 85 Pasal 86 Pasal 87 Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA dan 1 (satu) Pasal 105A		
41	PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK Mendukung PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41	2021	41	10-9-2021	BERLAKU			BAGIAN EKONOMI	
42	PETUNJUK TEKNIS PENYEDIA DAN PENYALURAN PERLENGKAPAN SEKOLAH UNTUK PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR	42	2021	42	10-9-2021	BERLAKU			DINAS PENDIDIKAN	
43	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	43	2021	43					BKAD	
44	PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH MELALUI MEDIA	44	2021	44	29-10-2021	BERLAKU			DISKOMINFO	
45	PETUNJUK PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL	45	2021	45	29-10-2021	BERLAKU			DKUPP	
46	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN	46	2021	46	29-10-2021	MENCABUT	<a href="#">Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019</a> tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan	bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada wilayah perdesaan dan perkotaan, perlu adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Air Minum pada beberapa wilayah di Kabupaten Bintan	BAGIAN ORGANISASI	
47	HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	47	2021	47	29-10-2021			bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan	BAGIAN ORGANISASI	



								Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah	
48	PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN	48	2021	48	29-10-2021				BKAD
49	PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	49	2021	49	1-11-2021	MENGUBAH	<b>PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN</b>	Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 8 ditambah satu ayat yakni ayat (3); Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah.	BKAD
50	PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PARKIR	50	2021	50	1-12-2021	MENCABUT	PERATURAN BUPATI NO 53 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PARKIR	Menyesuaikan Peraturan perundang-undangan yang tinggi, dan perubahan nomenklatur dinas dan badan	BAPPENDA
51	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN	51	2021	51	1-12-2021	MENGUBAH	PERBUP BINTAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN	1.ketentuan ayat (1) Pasal 4 ditambah 1 huruf i 2.ketentuan Pasal 6 diubah	RSUD
52	RENCANA STRATEGIS KABUAPTEN BINTAN	52	2021	52	10-12-2021	BERLAKU			BAPPELITBANG
53	RENCANA AKSI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 – 2024	53	2021	53	28-12-2021	BERLAKU			DISKOMINFO
54	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TANJUNG UBAN	54	2021	54	28-12-2021	BERLAKU			PUPR

55	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022	55	2021	55	30-12-2021	BERLAKU			BKAD	
56	PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022	56	2021	56	30-12-2021	BERLAKU			INSPEKTORAT	
57	TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	57	2021	57	30-12-2021	BERLAKU			BKAD	
58	TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	58	2021	58	30-12-2021	BERLAKU			BKAD	

Bandar Seri Bentan, 3 Januari 2022  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretraiat Daerah Kabupaten Bintan  
dto

NURHAYATI, S.H., MH  
PEMBINA TK.I  
NIP.19750417 200003 2 006